

## **MINIMNYA KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI RANAH PUBLIK DAN KEIKUTSERTAAN DALAM ISU-ISU POLITIK KONTEMPORER**

**Kristinawati, Efendi**

### ***Abstract***

*The lack of women's leadership in the public sphere and participation in contemporary political issues is an interesting discussion to be researched. This study aims to examine the factors that cause the lack of women's leadership, the views of experts and scholars regarding women's leadership and participation in political issues and how religion views women as leaders. This research is a qualitative research with the library research method . The results of the study show that the factors that affect the lack of women's leadership in the public sphere are education, employment issues, gender justice and equality, domestic roles, patriarchal culture, interpretation of religion and family relationships, discrimination and injustice against women in political parties and the public sphere. Women's leadership in the public sphere and their participation in contemporary political issues is highly encouraged, so that the work programs proposed by women are heard and accepted and implemented in the world of politics. The Qur'an as a reference to the principles of Islamic society emphasizes that Allah does not distinguish between the position of men and women, there is no reason to prohibit women from occupying the position of leader.*

***Keywords: Women, Women's Leadership, Politics***

### **PENDAHULUAN**

Dalam ajaran Islam, kajian tentang perempuan sepertinya tidak akan pernah selesai. Meskipun banyak kitab yang digali dan dikoreksi, dan buku-buku yang ditulis dan dipublikasikan, dan kampanye ataupun diskusi sudah digencarkan. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan dalam menafsirkan antara satu dengan yang lain. Islam adalah agama wahyu yang dibawa oleh rasul, disebarkan kepada sahabat, tabi'in,

ulama hingga masyarakat sekarang ini. Tingkat keyakinan atau keimanan dalam menerima ajaran berbeda satu dengan yang lain.<sup>1</sup>

Islam merupakan agama sempurna yang memposisikan laki-laki dan perempuan setaran sebagai makhluk di muka bumi. Demikian yang dikatakan oleh Nasaruddin Umar, bahwa; 1) laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah; 2) laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di muka bumi; 3) Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial, yaitu setiap anak yang lahir berikrar tentang ekstensi Tuhan; 4) Adam dan Hawa terlibat aktif dalam drama kosmis, yaitu kedua belah pihak secara aktif dan bersamaan dalam peristiwa turun ke bumi; 5) laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi.<sup>2</sup>

Agama turut serta dalam mengatur kehidupan umatnya, termasuk aspek politik dan kepemimpinan. Beberapa agama yang secara gamblang mengatur mengenai politik dan memilih pemimpin terdapat dalam agama Islam dan Kristen. Agama lainnya turut mengatur mengenai hal tersebut namun tidak secara eksplisit dalam kitab suci mereka. Misalnya agama Buddha dan Hindu lebih mengarah kepada bentuk kedamaian batin personal dan lebih focus dalam mengatur tingkah laku manusia yang baik dan buruk. Agama dapat menjadi hambatan bagi politik di Indonesia apabila disalahartikan, disalahtafsirkan dan bahkan digunakan untuk alat provokasi serta jualan politik. Akhirnya agama dikambing hitamkan dalam menciptakan kekacauan tatanan hukum dan pemerintahan karena konflik antar umat beragama.<sup>3</sup>

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, menunjukkan bahwa agama bagian integral yang mendasari tingkah laku manusia. Dalam sejarah lahirnya Islam telah banyak fakta-fakta dan konsensus-konsensus politik. Sistem pemerintah di masa nabi dan khalifahnya disebut oleh Thaha Husein sebagai sistem pemerintahan yang

---

<sup>1</sup>M. N. Ibad, *Kekuatan Perempuan dalam Perjuangan Gus Dur- Gus Miek*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011.

<sup>2</sup>Dewi Candra Hazani, Kepimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam di Era Modern. *Masaliq: Jurnal Pendidikan dan Sains*. Vol. 2 (2022), 685.

<sup>3</sup>Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin, *Dinamika Politik Kontemporer: Internasional dan Lokal dengan Hambatan dan Tantangan dalam Pencapaiannya*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 101.

bercorak Arab murni yang batas- batasannya ditentukan oleh agama, boleh jadi juga turut menumbuhkan pemahaman pemerintah Nabi sebagai pemerintahan yang ilahiah. Pemerintah nabi bukan pemerintahan yang didasarkan kepada wahyu, melainkan insan, yang artinya dibangun sesuai dengan kepentingan temporal.<sup>4</sup> Dapat disimpulkan bahwa politik dan sistem pemerintahan Islam di masa nabi dijalankan berdasarkan kepentingan bersama dan tetap berpedoman pada Al-Quran dan hadis.

Di Madinah, nabi memiliki otoritas spiritual yang mutlak dari Allah dalam bentuk kenabian, selain itu beliau juga mempunyai otoritas sosial-politik sebagai pemimpin negara. Prinsip demokrasi yang beliau tampilkan pada periode ini hadir dengan terbentuknya piagam Madinah yang sangat mengedepankan nilai keadilan dan kesamaan hak serta kedudukan di depan hukum. Setelah nabi wafat sistem kepemimpinan demokratis tersebut berlanjut ke masa pemerintahan *khulfaur rasyidini* dan baru mengalami distorsi menjadi sistem kerajaan pada periode berikutnya.<sup>5</sup> Pada perkembangan selanjutnya, bermunculan aktor- aktor pembaharu dalam dunia politik Islam. Hal tersebut berguna untuk menawarkan sistem pemerintah yang relevan. Beberapa contoh pandangan pembaharu Islam mengenai sistem pemerintahan Islam yaitu, *pertama*, memandang bahwa khalifah tradisional tidak bersifat mandat dan tidak secara ketat berdasarkan syari'ah. Sehingga umat Islam bebas memilih mengambil bentuk pemerintahan yang dianggap ideal. *Kedua*, Islam tidak menentukan norma-norma politik, sehingga dibebaskan dalam memilih cara yang bisa diterima untuk menangani masalah keduniawian.<sup>6</sup> Berdasarkan hal tersebut maka dalam Islam diperbolehkan mengambil bentuk pemerintahan dan kepemimpinan yang ideal asalkan untuk kemaslahatan bersama.

Kepemimpinan perempuan di ranah publik masih tergolong minimnya, hal tersebut dipengaruhi oleh *male chauvinism*, yaitu anggapan bahwa laki-laki lebih baik

---

<sup>4</sup>Nursyamsu, Perkembangan Politik Islam Kontemporer. *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 5 No. 02 (2017), 170.

<sup>5</sup>Ibid.

<sup>6</sup>Ibid., 172.

dalam memimpin dari pada perempuan. Pandangan tradisional menganggap bahwa perempuan adalah sosok yang lemah, halus dan emosional. Anggapan itu diperkuat dengan kebanyakan teori- teori kepemimpinan yang tidak hanya menolak peran perempuan dan bias gender di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, pendidikan, tetapi juga dalam organisasi.<sup>7</sup>

Memahami penjelasan di atas, minimnya kepemimpinan perempuan di ranah publik dan keikutsertaan dalam isu-isu politik kontemporer menjadi kajian tersendiri yang menarik untuk diteliti lebih dalam lagi. Maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Minimnya Kepemimpinan Perempuan di Ranah Publik dan Keikutsertaan dalam Isu-Isu Politik Kontemporer”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu memberikan perhatian terhadap data alamiah, data dalam hubungannya dengan konteks dan keberadaannya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka. Teknik studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi yang ada dalam teks. Dan juga teknik pustaka merupakan teknik pengumpulan data, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang terkait dengan masalah yang dipecahkan. Penelitian ini dimulai dengan membaca dan mengumpulkan semua literatur, lalu menelaah dan mengolah informasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan topic penelitian yaitu mengenai kepemimpinan perempuan di ranah public dan isu-isu politik kontemporer.

## **PEMBAHASAN**

Dalam perkembangan umat manusia yang semakin kompleks, dominasi laki-laki berkembang pesat dan mempengaruhi pemikiran serta ajaran agama mengenai

---

<sup>7</sup>Hesti Dina Aulia, Yudin Citraadin, Muhammad Thori, Kepemimpinan Perempuan dalam Lembaga Pendidikan Islam (Studi Kasus Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin NW Anjani. *Manazhim: Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, Vol.05 No.01 (2023), 437.

kepemimpinan. Sehingga meninggalkan pemikiran kepemimpinan perempuan. Tradisi kerasulan, kenabian, kewalian, keulamaan semuanya menempatkan laki-laki sebagai pemimpin ideal umat dan bukan perempuan. Meskipun dari rahim, timangan dan pangkuan perempuan para pemimpin besar itu berasal.

Kepemimpinan perempuan hanya sesekali disebut dalam sejarah, seperti Hawa, Sarah ummi Ishaq AS dan Ismail AS, Maryam binti Imron, Aisyah istri Fir'aun, Masyitoh, Balqis, Cleopatra, Aisyah, Khodijah, Fatimah, Rabi'ah al-Adawiyah dan beberapa yang lain.<sup>8</sup> Para penyampai ajaran yang mayoritas laki-laki selalu menonjolkan sosok kepemimpinan dan kenabian-kewalian laki-laki daripada perempuan, maka perempuan menjadi semacam sufi di balik hijabnya.<sup>9</sup>

Kebiasaan feodalisme masyarakat pada masa sekarang mengakibatkan munculnya sikap yang acuh tak acuh dalam memilih pemimpin. Hal ini menyebabkan munculnya dinasti politik turun temurun selama puluhan tahun yang berada dalam suatu daerah pemerintahan tertentu. Hal ini tentu saja mencederai dinamika politik yang baik yang berusaha dicapai oleh seluruh masyarakat Indonesia dimana kepentingan politik dinasti pada umumnya berupaya menjaga dan melanggengkan kekuasaannya demi sebagian kecil kelompok yang ada di belakang mereka. Hal ini menjadi hambatan bagi upaya kaum perempuan untuk berpolitik di Indonesia.<sup>10</sup>

Mansour Faqih menjelaskan bahwa terdapat bentuk-bentuk ketidakadilan gender di masyarakat, salah satu poinnya adalah terjadinya subordinasi, penomorduaan perempuan dalam kehidupan politik. Bentuk ketidakadilan ini bahwa perempuan ditempatkan pada posisi yang kurang penting, posisi yang tidak memiliki wewenang untuk memimpin dan mempengaruhi proses pembentukan keputusan. Bentuk subordinasi yang dimaksud bahwa perempuan memiliki pembawaan “emosional”,

---

<sup>8</sup>M. N. Ibad, *Kekuatan Perempuan dalam Perjuangan Gus Dur- Gus Miek*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011.

<sup>9</sup>Ibid.

<sup>10</sup>Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin. *Dinamika Politik Kontemporer: Internasional dan Lokal dengan Hambatan dan Tantangan dalam Pencapaiannya*. Bandung: Alfabeta. 2017.

sehingga dianggap tidak tepat tampil sebagai pemimpin. Kalau pun ada, jumlah pemimpin perempuan masih sedikit dibanding populasinya.<sup>11</sup>

Minimnya kepemimpinan perempuan di ranah publik juga dipengaruhi oleh *male chauvinism*, yaitu anggapan bahwa laki-laki lebih baik dalam memimpin daripada perempuan. Pandangan tradisional menganggap bahwa perempuan adalah sosok yang lemah, halus dan emosional. Anggapan itu diperkuat dengan kebanyakan teori-teori kepemimpinan yang tidak hanya menolak peran perempuan dan bias gender di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, pendidikan, tetapi juga dalam organisasi.<sup>12</sup>

Peran perempuan dalam berbagai aspek seperti kepemimpinan Islam dan politik, bahwa perempuan masih ditempatkan pada anggota kepengurusan. Ini diperkuat dari informan perempuan dalam organisasi masyarakat bahwa perempuan masih dianggap tidak pemberani. Sehingga program kerja yang diusulkan oleh perempuan tidak begitu terdengar dan diterima serta diimplementasikan ke dunia politik.<sup>13</sup>

Posisi perempuan dalam partai politik hanya sedikit, kuota yang diberikan 30 % tetapi hingga saat ini masing kurang lebih 22.9 % ini dibuktikan melalui wawancara. Perempuan yang dapat terlibat sebagai pengurus partai dan mengemban tugas-tugas adalah perempuan dengan pendidikan yang tinggi. Selain pendidikan, kendala lain yang dialami perempuan dalam partai politik yaitu adanya persoalan pekerjaan, keadilan dan kesetaraan gender, peran domestik, budaya patriarki, penafsiran agama dan hubungan kekeluargaan. Sehingga membuat kesan bahwa kebanyakan perempuan yang tidak mau terlibat politik. Fakta di lapangan bahwa telah terjadi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan dalam partai politik.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press, 2020.

<sup>12</sup>Hesti Dina Aulia, Yudin Citraadin, Muhammad Thori, Kepemimpinan Perempuan dalam Lembaga Pendidikan Islam (Studi Kasus Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin NW Anjani. *Manazhim: Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, Vol.05 No.01 (2023), 437.

<sup>13</sup>Dewi Candra Hazani, Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam di Era Modern. *Masaliq: Jurnal Pendidikan dan Sains*. Vol. 2, No. 5 (2022), 692.

<sup>14</sup>Ibid.

Al-Quran telah menunjukkan adanya kepemimpinan dari kaum perempuan, yaitu Ratu Balqis, seorang pemimpin dari negeri Saba. Kepemimpinan Ratu Balqis dituliskan dalam Al-Quran setara dan sebanding dengan kepemimpinan Nabi Sulaimana AS. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam kitab suci dan wacana keagamaan, mempunyai landasan teologis, maka kita wajib mengimani dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam konteks kesetaraan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam memimpin, berdasarkan tingkat kemampuan dan kualitas yang dimiliki masing-masing.

Peran dan posisi perempuan dapat maksimal di berbagai bidang baik itu kepemimpinan maupun politik. Dalam buku *Kekuatan Perempuan dalam Perjuangan Gus Dur-Gus Miek* dituliskan bahwa Gus Dur dengan keluasan pergaulannya banyak menemukan dan mengakui tingkat kecerdasan dan keilmuan perempuan bahkan dapat melebihi kaum lelaki. Perempuan paling berjasa bagi Gus Dur bernama Rubi'ah, seorang guru bahasa Inggris yang berjasa dalam membina minat membaca Gus Dur sejak kecil. Lalu ibunda Gus Dur, di samping itu terdapat seorang perempuan, teman lama Gus Dur yang bernama Ratih Hardjono. Ratih dengan kemampuan dan kecerdasannya berhasil memaksa Gus Dur untuk disiplin dalam berkampanye.<sup>15</sup>

Gus Miek mengeluarkan ungkapan dan pengakuannya akan kecerdasan perempuan, seperti mengenai Ayu Wedayanti. Perempuan yang berhak meneruskan kepemimpinan jami'iyah, lalu Erna Jailani yang cerdas dalam memahami ajaran yang disampaikannya, ada lagi Putri Kiai Dalhar (Nur) yang menurut Gus Miek memiliki kapasitas 100 perempuan. Perempuan adalah sosok yang lebih bisa memahami strategi yang tepat untuk bisa mengajak suami dan anak-anaknya.<sup>16</sup>

Sejalan dengan pemikiran Gus Dur, bahwa tafsiran semua produk agama, baik itu yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis, harus dicari informasi sebanyak-banyaknya tentang akar kesejarahannya, para ulama dan kian harus memiliki kejelian

---

<sup>15</sup>M. N. Ibad, *Kekuatan Perempuan dalam Perjuangan Gus Dur- Gus Miek*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011.

<sup>16</sup>Ibid.

yang sama. Apabila tidak, maka akan terjadi kekacauan dan masyarakat akan terombang-ambing. Adapun Gus Miek pada dasarnya tidak memiliki permasalahan bila kepemimpinan dipegang oleh perempuan. Wilayah kenegaraan atau politik adalah sebuah sistem keteraturan antar berbagai lini, bukan wilayah murni keagamaan yang menyangkut *wasilah* atau perantara langsung kepada Allah SWT.<sup>17</sup>

Berdasarkan pemikiran Gus Dur dan Gus Miek dapat diambil sebuah kesimpulan dalam memandang kepemimpinan perempuan pada wilayah public, keduanya bersandikan pada potensi yakni potensi kecerdasan yang didalamnya termasuk pada kelincahan, cerdas dalam bertindak dan mengambil keputusan dan kesempatan, mengorganisir, menyelesaikan masalah dan lainnya.<sup>18</sup> Jadi perempuan yang memiliki kemampuan dan potensi hendaknya terlibat dalam kepemimpinan dan isu-isu politik kontemporer. Lalu menyadari akan persamaan hak dan peran dengan laki-laki dan tidak menerima mentah-mentah apa yang sudah menjadi stereotip dan penafsiran yang belum tentu kebenarannya.

Kepemimpinan perempuan musti di ranah public musti digencarkan. Pemimpin perempuan dapat membuka spectrum penuh perbedaan gender, membangun harapan, dan menyusun kembali strategi untuk menunjukkan keasliannya seperti di bidang otoritas, wawasan, empati, daya tawar, lobi dan keterlibatan sosial. Pemimpin perempuan dapat tampil di ranah public tanpa meninggalkan kodratnya sebagai seorang ibu dan anak perempuan.<sup>19</sup>

Al-Quran sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam mempertegas bahwa Allah tidak membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 membahas bahwa kualitas seseorang tergantung pada tingkat ketaqwaannya.

---

<sup>17</sup>M. N. Ibad, *Kekuatan Perempuan dalam Perjuangan Gus Dur- Gus Miek*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011.

<sup>18</sup>M. N. Ibad, *Kekuatan Perempuan dalam Perjuangan Gus Dur- Gus Miek*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011.

<sup>19</sup>Hesti Dina Aulia, Yudin Citraadin, Muhammad Thori, *Kepemimpinan Perempuan dalam Lembaga Pendidikan Islam (Studi Kasus Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin NW Anjani*. *Manazhim: Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, Vol.05 No.01 (2023), 438.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kami di sisi Allah ialah orang yang bertaqwa”.

Laki-laki dan perempuan diciptakan dalam satu *nafs* (*living entity*), tidak ada keunggulan terhadap satu sama lain. Hak seorang istri diakui sederajat dengan hak suami. Dengan kata lain, laki-laki memiliki hak dan kewajiban terhadap perempuan, dan perempuan memiliki hak dan kewajiban terhadap laki-laki.<sup>20</sup> Ini mematahkan anggapan bahwa agama Islam tidak mengunggulkan laki-laki dari pada perempuan. Kultur yang merendahkan perempuan juga hendaknya dihilangkan.

Dalam menelaah Al-Quran tidak ada alasan yang tegas dalam melarang perempuan menduduki posisi sebagai kepala negara, pemimpin lembaga, ataupun kepala rumah tangga. Asghar Ali Engineer menyatakan bahwa beberapa ayat al-Quran yang seolah-olah menempatkan kedudukan laki-laki di atas perempuan, hendaknya dipahami sebagai struktur dan norma sosial pada masa itu bukan suatu norma ajaran yang diterapkan hingga kini.<sup>21</sup> Maka penting bagi kita mengawal dan mengadakan kajian kritis guna untuk mengakhiri bias gender dan dominasi tafsir agama yang menyudutkan perempuan.

Sebagai contoh, surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi “Laki-laki adalah pengelola atas perempuan”. Ayat ini menjelaskan saat itu laki-laki adalah manajer

---

<sup>20</sup>Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (Yogyakarta: Insist Press, 2020), 105.

<sup>21</sup>Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (Yogyakarta: Insist Press, 2020), 107.

rumah tangga dan bukan pernyataan bahwa laki-laki harus menguasai atau memimpin. Saat ayat itu diwahyukan belum ada kesadaran akan hak perempuan, pada masa itu perempuan lebih rendah dari pada laki-laki dan masa feodal perempuan mengabdikan pada laki-laki. Padahal, dalam Al-Quran ditegaskan bahwa kedudukan suami dan istri sejajar. Maka tafsiran agama memang berperan penting salah satunya atas kedudukan perempuan di ranah publik.

Lalu contoh lain, mengenai “hadis ahad” riwayat Abu Bakar yang melarang perempuan menduduki posisi pemimpin. Hadis tersebut berlawanan dengan peristiwa Perang Unta, Aisyah istri nabi memimpin komandan perang. Nabi sendiri tidak membedakan peran laki-laki dan perempuan dalam memimpin. Artinya penafsiran agama berkaitan erat dengan aspek ekonomi, sosial, politik, kultural dan ideologi.<sup>24</sup> Maka perlu untuk kita memahami bahwa agama yang ditafsirkan dipengaruhi oleh pandangan penafsirnya dan membutuhkan analisis sosial salah satunya seperti analisis gender.

## **PENUTUP**

Faktor-faktor yang mempengaruhi minimnya kepemimpinan perempuan di ranah publik adalah pendidikan, kendala lain yang dialami perempuan dalam partai politik yaitu adanya persoalan pekerjaan, keadilan dan kesetaraan gender, peran domestic, budaya patriarki, penafsiran agama dan hubungan kekeluargaan. Fakta di lapangan bahwa telah terjadi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan dalam partai politik.

Kepemimpinan perempuan di ranah publik dan keikutsertaannya dalam isu-isu politik kontemporer dianjurkan, hal tersebut agar program kerja yang diusulkan oleh perempuan terdengar dan diterima serta diimplementasikan ke dunia politik. Al-Quran sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam mempertegas bahwa Allah tidak membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 membahas bahwa kualitas seseorang tergantung pada tingkat ketaqwaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Nursyamsu. Perkembangan Politik Islam Kontemporer. *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 5 No. 02 (2017), 170.
- Fauzan. *Islam dan Kemodernan Politik berbasis Pemuda*. Binamuda, 2008.
- Ibad, N. *Kekuatan Perempuan dalam Perjuangan Gus Dur-Gus Miek*. Pustaka Pesantren, 2011.
- Hazani, Dewi Candra. Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam di Era Modern. *Masaliq: Jurnal Pendidikan dan Sains*, Vol 2, Nomor 5 (2022), 685.
- Rusfiana Yudi dan Ismail Nurdin. *Dinamika Politik Kontemporer: Internasional dan Lokal dengan Hambatan dan Tantangan dalam Pencapaiannya*. Alfabeta. 2017.
- Angraini, Dian, dkk. Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Tafsir Tematik. *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 16, No. 06 (2022), 2601.
- Putri Rahma, Verica. Wacana Kekuasaan dalam Novel *Animal Farm* Karya George Orwell: Perspektif Wacana Michel Foucault, *Skripsi. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya*. 2012.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Insist Press. 2020.
- Aulia, Hesti Dina, Yudin Citriadin, Muhammad Thohri. Kepemimpinan Perempuan dalam Lembaga Pendidikan Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin NW Anjani. *Manazhim : Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, vol. 5 No. 1 (2023), 435-455.